

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERMENKES
NOMOR HK.02.02/MENKES/068/II/2010 TENTANG
PEMBERIAN OBAT GENERIK DIKAITKAN
DENGAN HAK PASIEN ATAS
PELAYANAN KESEHATAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2 (Dua)

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKAAN

253/S₂/MHK/C₁

8/6/12

PAPAF : *uf*

Diajukan oleh :
Carissa Lidia
NIM 09.93.0082

kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERMENKES
NOMOR HK.02.02/MENKES/068/II/2010 TENTANG
PEMBERIAN OBAT GENERIK DIKAITKAN
DENGAN HAK PASIEN ATAS
PELAYANAN KESEHATAN**

Diajukan oleh:

Nama: Carissa Lidia

NIM: 09.93.0082

telah disetujui oleh:

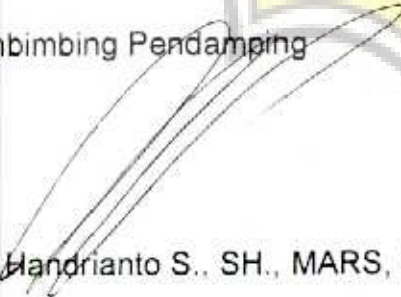
Pembimbing Utama



R. Ismadi Bekti, SH., MH

Tanggal, 4 April 2012

Pembimbing Pendamping



drg. Handrianto S., SH., MARS, MHKes

Tanggal, 7 April 2012



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

**Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **CARISSA LIDIA**

Nim : **09.93.0082**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. R. Ismadi S. Bekti, SH., MH
2. Drg. Handrianto, SH., MARS., MH.Kes
3. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 17 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pimpinan-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat memperoleh Derajat Sarjana Strata Dua Program Studi Hukum Kesehatan.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau adalah hak setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu unsur penting dan merupakan intervensi yang paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pemberian obat. Pemerintah berupaya mencukupi kebutuhan obat bermutu baik, terdistribusi merata, dan harga terjangkau dengan mendorong penggunaan obat generik yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010.

Mudah-mudahan dengan adanya penulisan tesis ini, penulis berharap dapat memberikan kejelasan mengenai penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010 tentang pemberian obat generik dan hak pasien atas pelayanan kesehatan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa di dalam Penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya kepada :

Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. A. Widanti S, S.H., CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Bapak R. Ismadi Bekti, SH., MH., selaku guru dan pembimbing tesis yang dengan tulus dan bijaksana memberikan bimbingan, dorongan serta petunjuk dan saran yang amat berharga selama penyusunan, perbaikan, dan penyelesaian tesis ini;

drg. Handrianto Sutanudjaja, SH., MARS, MHKes, selaku pembimbing tesis yang secara khusus telah memberikan pengarahan dan berbagai saran perbaikan guna penyempurnaan tesis ini;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Para rekan sejawat Angkatan VIII Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata di Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Khusus kepada dr. Herryanto Agustriadi S., MHKes sebagai sumber semangat, papa Rudy Hendrawanto dan mama Christine Laurentia Yosephine sebagai motivasi terbesar dan selalu memberi dukungan tanpa henti, serta keluarga besar yang selalu sabar membantu, mendorong, dan memberi semangat, baik moril maupun materiil sehingga dapat terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini.

Bandung, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	ix
Halaman Pernyataan.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	14
F. PENYAJIAN TESIS.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	18
A. PENGANTAR.....	18

B. PENERAPAN PERMENKES NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010	
TENTANG PEMBERIAN OBAT GENERIK	20
1. Pengantar.....	20
2. Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010	21
a. Sejarah.....	21
b. Penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010	23
c. Pemberlakuan Sanksi	27
3. Pemberian Obat Generik	28
a. Pengertian Obat	28
b. Pemberian Obat	31
c. Kebijakan Pemerintah Mengenai Obat.....	39
d. Strategi Obat Esensial	66
d. Penggolongan Obat	70
e. Obat Generik	72
C. HAK PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN	75
1. Pengantar.....	75
2. Pengertian Pasien	75
3. Hak Pasien.....	76
4. Pelayanan Kesehatan	79
a. Pengertian.....	79
b. Dokter sebagai Tenaga Kesehatan.....	80
c. Jenis Pelayanan Kesehatan	83
d. Hak Pasien atas Pelayanan Kesehatan.....	85
5. Asas Keadilan	87
a. Pengantar	87
b. Asas Hukum	88
c. Asas Keadilan.....	90
d. Asas Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan.....	97

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
A. PENGANTAR	101
B. PENERAPAN PERMENKES NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 TENTANG PEMBERIAN OBAT GENERIK	103
1. Bentuk Penerapan Permenkes di Fasilitas Kesehatan Pemerintah....	103
2. Kewajiban Dokter atas Pemberian Obat Generik	106
3. Pemberlakuan Sanksi atas Pelanggaran Permenkes	109
C. HAK PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN	110
1. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	110
2. Asas Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan	112
D. ANALISIS PENERAPAN PERMENKES NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 TENTANG PEMBERIAN OBAT GENERIK DAN HAK PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN	113
E. PENUTUP	125
BAB IV PENUTUP.....	128
A. KESIMPULAN	128
B. SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010	138



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Carissa Lidia, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.93.0082,

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 April 2012

Carissa Lidia

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau adalah hak setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu unsur penting dan merupakan intervensi yang paling banyak digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pemberian obat. Pemerintah berupaya mencukupi kebutuhan obat bermutu baik, terdistribusi merata, dan harga terjangkau dengan mendorong penggunaan obat generik yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan metode kualitatif normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bentuk penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010, yaitu berupa kewajiban pemberian obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah. Pemberian obat generik ini diupayakan semaksimal mungkin oleh petugas kesehatan (dokter dan petugas farmasi), perusahaan farmasi, dan pemerintah. Kewajiban pemberian obat generik merupakan langkah konkrit menjalankan amanat Undang-Undang, bentuk tanggung jawab petugas kesehatan dan pemerintah, perwujudan pemenuhan hak pasien, serta mengatasi ketidakterjangkauan pelayanan kesehatan oleh sebagian masyarakat.

Kata kunci : Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010, Obat Generik, Hak Pasien

ABSTRACT

The right to obtain a safe, quality, and affordable health service is the right of every human being. Because individuals, families, and communities are entitled to health protection, and the government has the responsibility to fulfill the right to health for all of the residents including the poor and underserved. One of important element is the most widely used intervention in the administration of health services is the provision of drugs. The government has tried to make good-quality drugs sufficient, evenly distributed, and by encouraging the use of affordable generic drugs specified in Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010.

The method used is a method of normative juridical approach, the specification is descriptive analytical study, using secondary data sources including primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the data were analyzed with qualitative normative method.

The results that obtained are the application Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010, the form of liability provision of generic drugs in government health facilities. Generic drug is sought as much as possible by health professionals (doctors and pharmacy staff), pharmaceutical companies, and government. Obligations of the generic drug is a concrete step to run the mandate of the Act, a form of responsibility and government health workers, the embodiment of the fulfillment of patients' rights, as well as to overcome the expensive health care to most people.

Keywords: Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010, Generic Drugs, Patient Rights